



JUMAT, 7 DESEMBER 2018

SUMBER BERITA

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| | RAKYAT BENGKULU | MEDIA INDONESIA |
| X | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS |
| | RADAR BENGKULU | |

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Berkas 3 Tersangka Korupsi DD P21

ARGA MAKMUR, BE - Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bengkulu Utara kembali memeriksa dua orang Kepala Desa (Kades) dan satu orang Bendahara terkait kasus dugaan korupsi Dana Desa tahun 2016, kemarin (6/12). Mereka adalah Kades Paku Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, Sarkani dan Bendaharannya Efendi, serta Kades Gajah Mati, Rohmanto. Ketiga tersangka tersebut menjalani pemeriksaan tahap 2 yakni P21 ke kejaksanaan.

Kapolres Bengkulu Utara AKBP Ariefaldi Warganegara SH SIK MM melalui Kasat Reskrim AKP M Jurfi SIK mengatakan bahwa ketiga tersangka atas dugaan korupsi DD tahun 2016 diserahkan ke Jaksaan Negeri Arga Makmur untuk melakukan pemeriksaan tahap 2.

"Ya hari ini mereka kita serahkan ke kejaksanaan untuk dilakukan pemeriksaan tahap 2 yakni P21," kata Kasat.

Ia menjelaskan, Kades Gajah Mati merugikan neg-

ara Rp 521.255.276. Jumlah tersebut berasal dari pengelolaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa tahun 2016 yang semua kegiatannya fiktif. Diduga kuat Rohmanto bekerja sendirian, sehingga semua dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya.

"Untuk Kades Gajah Mati, semua uangnya digunakan untuk keperluan pribadi. Dia ini bekerja sendiri, tidak melibatkan orang lain," imbuhnya. Sementara Kades Paku Haji,

yang mengaku sama sekali tidak paham cara pengelolaan dana desa dan anggaran dana desa. Karena tidak tahu, Sarkani menyerahkannya kepada bendahara dengan mengakibatkan kerugian negara yang mencapai Rp 497.554.807.

"Khusus Kades Paku Haji, dia tidak tahu karena memang pendidikannya kurang. Jadi, diserahkan pengelolaan dana desa dan anggaran dana desa kepada bendahara," terang Kasat Reskrim.

Lebih lanjut Kasat Rekrim menuturkan, ini merupakan pelajaran untuk aparat desa dan tidak melakukan hal yang sama, serta mengimbau agar dana desa di pergunakan sesuai dengan musyawarah desa dan untuk kepentingan warga.

"Ini merupakan pelajaran bagi aparat desa dan tidak melakukan hal yang sama, juga untuk kepala desa gunakanlah dana desa sesuai dengan musyawarah desa dan untuk kepentingan warga," tandasnya. (127)